

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROV. JAWA TENGAH
TAHUN 2020**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI JAWA TENGAH
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI2

DAFTAR TABEL3

DAFTAR GRAFIK4

DAFTAR GAMBAR.....5

KATA PENGANTAR.....6

BAB I PENDAHULUAN.....7

 A. Gambaran Organisasi.....7

 1. Tugas Pokok dan Fungsi.....7

 2. Sumber Daya.....13

 B. Fungsi Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah19

 1. Visi Jawa Tengah 2018 – 202319

 2. Misi.....19

 3. Tujuan.....19

 4. Sasaran20

 C. Isu – isu Strategis dalam PB di Jawa Tengah20

 D. Sistematika Penulisan21

BAB II PERJANJIAN KINERJA23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA25

 A. Capaian Kinerja Organisasi25

 1. Sasaran Strategis 127

 2. Sasaran Strategis 230

 3. Sasaran Strategis 3.....34

 4. Sasaran Strategis 4.....38

 5. Sasaran Strategis 5.....41

 B. Realisasi Anggaran45

BAB IV P E N U T U P48

 A. Kesimpulan.....48

 B. Saran.....48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 201812

Tabel 2 Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah13

Tabel 3 Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah14

Tabel 4 Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2019.....15

Tabel 5 Penetapan Kinerja TA 202024

Tabel 6 Skala Pengukuran Kinerja26

Tabel 7 Perhitungan Kinerja Sasaran 1.....28

Tabel 8 Efisiensi Anggaran Sasaran 129

Tabel 9 Perhitungan Kinerja Sasaran 2.....31

Tabel 10 Efisiensi Anggaran Sasaran 232

Tabel 11 Perhitungan Kinerja Sasaran 3.....35

Tabel 12 Efisiensi Anggaran Sasaran 338

Tabel 13 Perhitungan Kinerja Sasaran 4.....39

Tabel 14 Efisiensi Anggaran Sasaran 440

Tabel 15 Perhitungan Kinerja Sasaran 5.....42

Tabel 16 Efisiensi Anggaran Sasaran 543

Tabel 17 Pengukuran Pencapaian Sasaran44

Tabel 18 Realisasi Keuangan APBD TA 202045

Tabel 19 Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 202047

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2018.....13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah15

Gambar 2 Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Wilayah Barat atas Partisipasi Aktif dalam PB Tahun 2019 oleh BNPB26

Gambar 3 Kontribusi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengurangan Risiko Bencana dari BNPB.....27

Gambar 4 Penghargaan Jogo Tonggo sebagai Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-1927

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah telah selesai. LKj-IP BPBD merupakan bentuk komitmen BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014. LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk laporan dan bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui LKj-IP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian Laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang,

Plt. KALAKHAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Tata Usaha

Ir. SAFRUDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690603 199403 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan /bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana.

Dalam undang-undang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) masyarakat, dan lembaga usaha. Secara ringkas dalam undang-undang 24 tahun 2007 berisikan tentang ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- d. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.

- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
- f. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
- g. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.
- h. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

Pembentukan BPBD Provinsi diwujudkan pada tahun 2008 berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No 101 tahun 2008 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2014, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa wilayah mengalami perubahan struktur organisasi perangkat daerah sebagai wujud penyesuaian terhadap perubahan beberapa urusan urusan pemerintahan. Sehubungan dengan adanya undang-undang tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti peraturan dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 pasal 13 menyebutkan bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan di Jawa Tengah.

Tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah telah dijabarkan pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008. Tugas pokok BPBD Provinsi Jawa Tengah (pasal 2) yaitu melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, sedangkan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah Pasal 3 adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

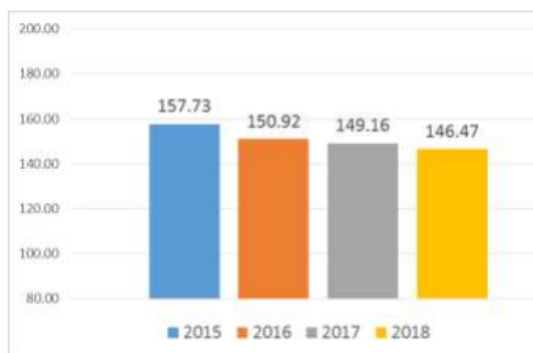
Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki gunung api aktif sebanyak 5 yakni Slamet, Dieng, Sundoro, Sumbing, dan Merapi. Selain itu, Jawa Tengah pula dilintasi oleh beberapa sesar aktif yaitu Sesar Baribis Kendeng, Sesar Ajibarang, Sesar Ungaran, Sesar Merapi-Merbabu, Sesar Muria, dan Sesar Pat Thrust. Pada selatan Jawa Tengah juga terdapat Zona Megathrust Jawa dengan Segmen Jawa Tengah. Kondisi ini yang menyebabkan wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kelas risiko sedang hingga tinggi, dengan semua jenis ancaman dimiliki di Jawa Tengah antara lain gempabumi, tsunami, letusan gunungapi, banjir, tanah longor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks risiko tinggi dengan score 146.47 (tabel 1).

Tabel 1
Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2015
sampai dengan Tahun 2018

NO.	KABKOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS RISIKO 2018
1	PURWOREJO	215.20	215.20	215.20	215.20	TINGGI
2	TEGAL	212.80	212.80	212.80	212.80	TINGGI
3	BREBES	211.20	211.20	211.20	211.20	TINGGI
4	BANYUMAS	207.20	207.20	207.20	207.20	TINGGI
5	PEMALANG	206.00	206.00	206.00	185.70	TINGGI
6	PEKALONGAN	183.20	183.20	183.20	183.20	TINGGI
7	PATI	174.00	174.00	174.00	174.00	TINGGI
8	REMBANG	171.60	171.60	171.60	171.60	TINGGI
9	BATANG	168.40	168.40	168.40	168.40	TINGGI
10	JEPARA	163.20	163.20	163.20	163.20	TINGGI
11	GROBOGAN	162.00	162.00	162.00	162.00	TINGGI
12	PURBALINGGA	159.20	159.20	159.20	159.20	TINGGI
13	BOYOLALI	159.20	159.20	159.20	159.20	TINGGI
14	BANJARNEGARA	150.00	150.00	150.00	150.00	TINGGI
15	BLORA	150.00	150.00	150.00	150.00	TINGGI
16	KOTA PEKALONGAN	147.60	147.60	147.60	147.60	TINGGI
17	WONOGIRI	145.60	145.60	145.60	145.60	TINGGI
18	SEMARANG	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG
19	TEMANGGUNG	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG
20	SRAGEN	142.00	142.00	142.00	142.00	SEDANG
21	KEBUMEN	203.20	165.76	151.08	140.31	SEDANG
22	CILACAP	215.20	175.53	159.77	139.90	SEDANG
23	KUDUS	131.60	131.60	131.60	131.60	SEDANG
24	KARANGANYAR	130.40	130.40	130.40	130.40	SEDANG
25	KENDAL	167.20	156.80	142.49	124.57	SEDANG
26	KLATEN	123.20	123.20	123.20	123.20	SEDANG
27	WONOSOBO	135.20	135.20	135.20	122.94	SEDANG
28	KOTA SEMARANG	183.60	124.72	124.72	120.75	SEDANG
29	DEMAK	183.60	138.20	127.42	118.21	SEDANG
30	KOTA TEGAL	116.80	116.80	116.80	116.80	SEDANG
31	KOTA MAGELANG	108.00	108.00	108.00	108.00	SEDANG
32	SUKOHARJO	93.20	93.20	93.20	93.20	SEDANG
33	KOTA SALATIGA	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
34	MAGELANG	143.20	96.86	90.82	90.82	SEDANG
35	KOTA SURAKARTA	80.00	80.00	80.00	80.00	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Grafik 1
Nilai Indeks Risiko Provinsi Jawa Tengah 2015 – 2018



▲ Grafik nilai indeks risiko Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

ANCAMAN BENCANA:

Gempabumi, Tsunami, Letusan gunungapi, Banjir, Tanah Longor, Kekeringan, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim / Abrasi, serta Kebakaran Hutan dan Lahan.

NILAI IRB 2018:

146.47
(TINGGI)

2. Sumber Daya

Upaya-upaya pengurangan risiko bencana harus dilaksanakan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Pengurangan risiko bencana merupakan tindakan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan manusia sehingga kerugian jiwa dan materil serta kerugian lainnya. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas diprioritaskan secara kelembagaan maupun sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana.

Jumlah personel sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah cukup terbatas. Jumlah dan tingkat pendidikan sumberdaya manusia (SDM) di BPBD Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Jawa Tengah

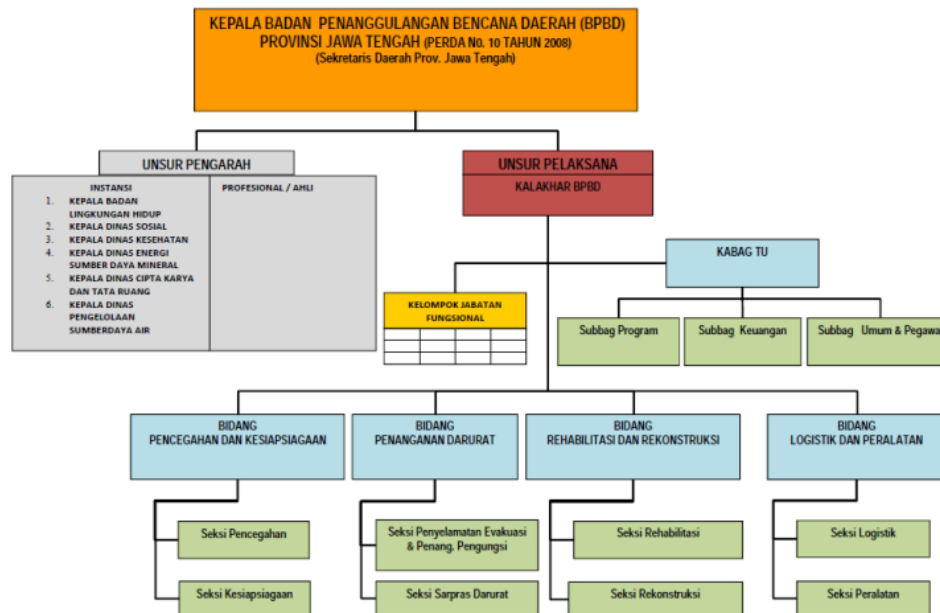
No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir							
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	D4	SMA	SMP	SD	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PNS	12	2	13	8		1	9	4	1	36
	Non PNS										0
	a. Tenaga Teknis	33	18	1	33	3		14			51
	Total	45	20	14	41	3	1	23	4	1	87

Sementara untuk dukungan sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	: 7 orang
a	Pembina Utama Madya (IV/d)	: 0 orang
b	Pembina Utama Muda (IV/c)	: 0 orang
c	Pembina Tk I (IV/b)	: 2 orang
c	Pembina (IV/a)	: 5 orang
2	Golongan III	17 orang
a	Penata Tk I (III/d)	: 7 orang
b	Penata (III/c)	: 4 orang
c	Penata Muda Tk I (III/b)	: 4 orang
d	Penata Muda (III/a)	: 2 orang
3	Golongan II	11 orang
a	Pengatur Tk I (II/d)	: 0 orang
b	Pengatur (II/c)	: 7 orang
c	Pengatur Muda Tk I (II/b)	: 3 orang
d	Pengatur Muda (II/a)	: 1 orang
4	Golongan I	1 orang
a	Juru Tk I (I/d)	: 1 orang
b	Juru (I/c)	: 0 orang
c	Juru Muda Tk I (I/b)	: 0 orang
d	Juru Muda (I/a)	: 0 orang
JUMLAH		: 36 orang

Struktur organisasi kelembagaan BPBD Prov. Jawa Tengah dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, BPBD Prov Jawa Tengah didukung dengan beberapa peralatan baik yang bersifat umum maupun khusus, sebagaimana tabel 4 berikut.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2019

No	Kode	Jenis Peralatan	Jumlah (unit)
1	2	3	4
I	01	Alat Transportasi	
		1 Mobil Ambulance	3
		2 Mobil Tangki BBM	
		3 Mobil Evakuasi	
		4 Mobil Pemadam Kebakaran	
		5 Helikopter	
		6 Mobil Komando	1
		7 Mobil Patroli	
		8 Mobil Jelajah	
		9 Mobil Operasional	13
		10 Mobil Komunikasi	1
		11 Mobil Rescue	8
		12 Motor Ops	14
		13 Motor Trail	12
		14 Mobil Jenazah	1
		15 Mobil Box	2
		16 Pick Up	2
		17 Mobil Logpal	1
		18 Truk Serbaguna	1
		19 Mobil Dapur Lapangan	1

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		20	Truk Logistik	1
		21	Truk Tangki Air	5
		22	Truk Urinoir MCK	2
		23	Mobil Water Treatmen	1
		24	Truk bak terbuka	2
		25	Kapal Motor	
		26	Mini Bus	1
		27	Mobil Klik	
			Jumlah	67
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi		
		1	Sistem Komunikasi Cepat	
		2	Portable Communication Mobile	
		3	HT	21
		4	RIG	6
		5	GPS	3
		6	Telepon Internet Satelit	
		7	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini	
		8	SSB/RPP	3
		9	UHF	3
		10	Wireless	
		11	Megaphone	3
		12	Repiter / Antena	4
		13	Video Shooting	
		14	Camera Digital	4
		15	Handycam	2
		16	Power Supply	2
			Jumlah	51
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi		
		1	Alat Pemotong Baja dan Beton	5
		2	Rompi	
		3	Life Jacket/Rompi Pelampung	48
		4	Lifebouy	8
		5	Perahu Karet 12 org	
		6	Perahu Karet 10 org	14
		7	Perahu Karet 8 org	2
		8	Perahu Karet 6 org	1
		9	Masker Full Face	6
		10	Perahu Fiber	12
		11	Perahu Lipat + Mesin 18 PK	1
		12	Trailer	2
		13	Perahu Polyethylene + Mesin 9,8 PK	
		14	Mesin Perahu 40 PK	5
		15	Mesin Perahu 25 PK	5
		16	Mesin Perahu 18 PK	5
		17	Mesin Perahu 15 PK	1
		18	Dolphin / speed boat	2
		19	Peralatan Selam	7
		20	Vertical Rescue	6
		21	Teropong / Teleskop	4
		22	Chain Saw	6
		23	Helm SAR	4
		24	Pulay	10
		25	Breathing Appars	2
		26	Life Detector	
		27	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	
		28	Pakaian Tahan Panas	2
		29	Pompa Perahu	14
		30	Rak Tempat Perahu Karet	5

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		31	Selang BBM	14
		32	Sandaran Mesin Tempel	4
		33	Perahu Alumunium	
		34	Jangkar	
		35	Ring Buoy	
		36	Tali PP 10 mm	
		37	Tangki BBM	14
		38	Dayung	20
		39	Pakaian Tahan Api	
		40	Helm Tahan Panas	
		41	Sepatu	
		42	Sarung Tangan	
		43	Helm Biasa	
		44	Perahu Kayu	2
		45	Bidai Spinal	2
		46	Perahu Amphibi	1
			Jumlah	222
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
		1	WTP 250 lt	2
		2	WTP 500 lt	0
		3	WTP mini	2
		4	Dapur Lapangan/Umum	
		5	Fleksible Tank 2000 lt	2
		6	Fleksible Tank 1000 lt	2
		7	Toilet Lapangan	
		8	Tenda Posko	13
		9	Tenda Keluarga	100
		10	Tenda Regu	30
		11	Tenda Pleton	24
		12	Tenda Pengungsi	5
		13	Tenda Sekolah	
		14	Tenda Lapangan	
		15	Tenda RS Lapangan	
		16	Tenda Individu	2
		17	Tenda Doom	
		18	Tandu Lipat	6
		19	Echosounder	2
		20	Velbed	125
		21	Tandon Air Plastik	
		22	Tandon Air Fiber Glas	1
		23	Tandu Spinal	
		24	Tenda Terpal Plastik	
		25	Jas Hujan	
		26	MCK Komunal	
			Jumlah	316
V	05	Alat Berat		
		1	Scope Loader	-
		2	Back Hoe	-
		3	Truck W Crane 3 Ton	-
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	-
		5	Crane on Wheel 15 Ton	-
		6	Wheel Loader 1,2 - 1,5 M3	-
		7	Head Tractor & trailer	-
		8	Loader	-
		9	Exavator	-
		10	Dump Truck	-
		11	Grader	-
		12	Bulldoser	-

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		13	Ponton	-
		14	Vibro Hammer	-
		15	Wheel Loader	-
		16	Ulhantor Roller	-
		Jumlah		-
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan		
		1	Senter	9
		2	Solar Sel Generator	
		3	Lampu Senter HID	2
		4	Lampu Srt Halogen	3
		5	Lampu Badai	
		6	Genset 5 KVA	2
		7	Genset 10 KVA	1
		8	Genset 1,2 KW	4
		9	Genset 1000 watt	6
		10	Solar Handle Lamp	60
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	7
		12	Light Tower Port	2
		13	Lampu senter HID Seacrh Light	4
		14	Kabel	3
		15	Tiang Lampu Lapangan	
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	4
		17	Senter Besar	
		18	Lampu Rotator	
		19	Lampu Sorot	
		20	Emergency Lamp	6
		Jumlah		
VII	7	Alat Pergudangan		
		1	Froklift	2
		2	Hand Froklift	1
		3	Gerobak Sorong	-
		4	Trolley	2
		5	Rak Gondola	
		6	Palka	100
		7	Safety Equipment	
		8	Tenda Gudang	
		9	Water Closed	
		10	Tabung Gas 12 Kg	
		11	Tabung Gas 3 Kg	
		12	Selang	
		13	Helm Kerja / PMK	
		14	Topi Proyek	
		Jumlah		105
VIII	8	Alat Lainnya		
		1	Pompa air	6
		2	Kawat Bronjong	
		3	Karung Plastik	-
		4	Garpu Sampah	-
		5	Dirgen 40 L	-
		6	Hand Sprayer	-
		7	Knock Down Closet	-
		8	Mesin Fogging	-
		9	Drag Bar	-
		10	Water furifier	-
		11	CCTV	-
		Jumlah		6
		Jumlah Total		897

Dukungan sarana dan prasarana yang dikelola BPBD Prov. Jawa Tengah digunakan untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh, dari pra bencana (pecegahan dan kesiapsiagaan), tanggap darurat, dan pasca bencana.

B. Fungsi Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah

BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi stretegis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan secara teintegrasi pada tiga tahapan bencana, yaitu pra bencana, darurat, dan pascabencana. Visi dan misi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Visi Jawa Tengah 2018 – 2023

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

2. Misi

- a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- b. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang regius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
- d. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- e. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana;

- b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

4. Sasaran

- a. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
- b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
- c. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
- f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

C. Isu – isu Strategis dalam PB di Jawa Tengah

Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial, dan sebagian besar penduduk di Jawa Tengah tinggal di daerah rawan bencana tersebut;
2. Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Belum optimalnya kuantitas/jumlah fasilitasi pembentukan desa tangguh. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko bencana tinggi;
4. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat sistem peringatan dini dan rambu petunjuk jalur evakuasi;
5. Masih terdapat 2 (dua) kota yang belum membentuk BPBD di Jawa Tengah yaitu Kota Salatiga dan Kota Magelang;

6. Anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kab/Kota masih terbatas dan beberapa Kab/Kota masih belum memadai dibandingkan dengan tingkat risiko bencana di wilayahnya;
7. Potensi sarana prasarana peralatan pendukung PB di satu daerah/ wilayah belum terdata dan terintegrasi dengan baik;
8. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah;
9. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
10. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, visi dan misi, tujuan, saran, rumusan masalah/isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah dan sistematika penulisan.

BAB II – PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini akan dibahas mengenai perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari capaian kinerja organisasi dari sasaran strategis 1 hingga sasaran strategis 5 dalam kinerja q tahun di tahun 2020.

BAB IV – PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang didalamnya menjelaskan tentang sasaran strategis masuk kedalam kinerja sangat baik serta saran peningkatan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Secara singkat keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kalakhar BPBD Prov Jateng dengan Gubernur Tahun 2020 (tabel 5).

Tabel 5
Penetapan Kinerja TA 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target
Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah dalam PB	3.54 (2%)
	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas wilayah PB didaerah rawan bencana	10%
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/ pemangku kepentingan PB	5%
	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100%
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai kepuasan masyarakat	75
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	75
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	66

Perjanjian kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang telah disepakati dengan Gubernur Jawa Tengah meliputi tujuan dan sasaran yang dicapai melalui 3 (tiga) Program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 16.117.051.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mendasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan gambaran progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Aspek penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran dengan kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang (tabel 6).

Tabel 6
Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

BPBD Prov Jawa Tengah TA 2020 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra).

Penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kebencanaan tahun 2020 antara lain:

1. Penghargaan atas Berpartisipasi Aktif Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2019 dalam "Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Wilayah Barat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)";



Gambar 2
Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Wilayah Barat atas
Partisipasi Aktif dalam PB Tahun 2019 oleh BNPB

2. Penghargaan atas kontribusi dalam Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Tengah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);



Gambar 3
Kontribusi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengurangan Risiko
Bencana dari BNPB

3. Serta penghargaan “Jogo Tonggo” sebagai Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 kategori Ketangguhan Masal dari Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).



Gambar 4
Penghargaan Jogo Tonggo sebagai Top 21 Inovasi Pelayanan
Publik Penanganan Covid-19

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah 2019 - 2023, sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1

- | | |
|---------------------|---|
| Sasaran Strategis 1 | : Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana (PRB) |
| Indikator | : Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana |

Jenis : progress positif
 Satuan : persen (%)
 Target : 10

Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan PRB, diukur berdasarkan jumlah wilayah yang telah dilakukan upaya mitigasi dimaksud dibagi dengan jumlah desa rawan bencana tinggi dikali 100%. Jumlah desa rawan bencana ini merupakan 1.400 desa rawan bencana longsor tinggi yang tercatat di IRBI tahun 2018. Jumlah wilayah yang difasilitasi merupakan wilayah yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik melalui pengembangan masyarakat, pelatihan maupun fasilitasi alat seperti pemasangan EWS dan Rambu jalur evakuasi. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 7.

Tabel 7
Perhitungan Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Tahun 2019	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah rawan bencana	10	10.71	107.10	100.60	21.42

Penambahan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah rawan bencana tahun 2020 terealisasi sebesar 10,71% dari target semula adalah 10%. Hal ini berarti bahwa peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah tercapai sebesar 107,10% yaitu kategori sangat baik atau melebihi target pencapaian 100%. Apabila ditinjau dari rencana strategis 2019-2023, penambahan kapasitas PB di wilayah rawan bencana sudah mencapai 21,42% dari target 50% dalam lima tahun.

Realisasi capaian sebesar 10,71% dari target 10% dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko tahun 2020 diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas PB di wilayah rawan bencana. Upaya tersebut melibatkan para pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah melalui mitigasi non struktural (sosialisasi, gladi atau simulasi, pelatihan, penyusunan dokumen perencanaan PB, dan pembentukan desa tangguh bencana).

Kegiatan yang telah dilakukan di Jawa Tengah meliputi Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (Idensos), Satuan Pendidik Aman Bencana (SPAB), Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), Pengembangan Forum PRB, Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (KPRB) dan Pengembangan PRB Inklusi Disabilitas (Pembentukan Unit LIDi dan Pelatihan).

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini semula adalah Rp 9.300.000.000,- dan menjadi Rp 2.917.737.000,- setelah mengalami refokusing akibat bencana non-alam yaitu Pandemi Covid-19, berkurang sebesar Rp 6.382.263.000,- atau 68.63% dari anggaran semula. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp 2.728.532.272,- (93.52%) dan terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp 189,204,728,- (6.48%).

Tabel 8
Efisiensi Anggaran Sasaran 1

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (,000)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Penanggulangan Bencana	2,917,737	2,728,532,2	93.52%	100%	189,204,728	6.48%
Pengembangan masyarakat tangguh bencana	330,436	315,027,6	95,34%	100%	15,408,326	4.66%
Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	2,007,787	1,938,040,3	96,53%	100%	69,746,681	3.47%
Pengembangan alat sistem peringatan dini (early warning system) & rambu informasi bencana jtg	198,703	195,194,5	98,23%	100%	3,508,500	1.77%

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan/ pra bencana	380,811	280,269,7	73,60%	100%	100,541,221	26.40%
---	---------	-----------	--------	------	-------------	--------

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana
- 2) Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana
 - a) Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (Idensos);
 - b) Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK);
 - c) Pengembangan Forum PRB;
 - d) Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (KPRB);
 - e) Pengembangan PRB Inklusi Disabilitas (Pembentukan Unit LIDi dan Pelatihan);
 - f) Satuan Pendidik Aman Bencana (SPAB).
- 3) Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Rambu Informasi Bencana Jateng
- 4) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana
 - a) Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2020-2021;
 - b) Penyusunan Dokumen Renkon.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	: Meningkatkan kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
Indikator	: Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB
Jenis	: Progres positif
Satuan	: %
Target	: 5

Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana, diukur melalui persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB yaitu jumlah relawan TRC/pemangku kepentingan dibagi dengan jumlah relawan di Jawa Tengah (20.000 orang) dikali 100%. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 9.

Tabel 9
Perhitungan Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Th 2020	% Capaian Th 2019	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	5	5.10	102	363	20.40

Penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB tahun 2020 terealisasi sebesar 5,10% dari target semula adalah 5%. Hal ini berarti bahwa meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah tercapai sebesar 102% atau termasuk dalam kategori sangat baik yaitu melebihi target pencapaian 100%. Apabila ditinjau dari rencana strategis 2019-2023, penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB sudah mencapai 20,40% dari target 25% dalam lima tahun.

Pencapaian sasaran tersebut, didukung kegiatan peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda seperti kegiatan Simulasi Penanganan Darurat Bencana bagi Pelajar. Sekolah berperan penting dalam membangun kesadaran bencana dalam masyarakat, dengan demikian upaya yang dilakukan adalah bagaimana membangun sekolah yang siap siaga menghadapi bencana alam. Sekolah memiliki

beberapa fungsi dalam pengurangan resiko bencana termasuk memfasilitasi dan bekerjasama dengan lingkungan sekitar, meningkatkan kacakapan masyarakat, pusat penampungan pengungsi ketika terjadi bencana.

Pada kegiatan Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng terbagi menjadi beberapa sub kegiatan adalah latihan gabungan relawan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di Kabupaten Sukoharjo dengan tetap menerapkan prokes dengan 3 M dan menjauhi kerumunan. Diharapkan dari pelatihan TRC ini adalah bertambahnya ilmu pengetahuan tentang bagaimana merespon bencana sebagai anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan melibatkan dari narasumber yang telah memiliki pengalaman pada bidangnya yaitu antara lain BMKG Stasiun Semarang, UNNES Semarang, BPBD Kab. Magelang serta ABDI Regional Jateng dengan jumlah peserta masing-masing kegiatan 50 orang yang dilaksanakan sebanyak 2 kali menjadi 100 orang.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp 1,503,428,000,- atau sebesar 9.33% dari jumlah anggaran BPBD Prov. Jateng dari Anggaran Rutin. Realisasi keuangan pada akhir tahun adalah Rp 1,161,029,900,- dan realisasi fisik sebanyak Rp 1,226,318,500,- atau 77.23% dan efisiensi anggaran seperti pada table 10.

Tabel 10
Efisiensi Anggaran Sasaran 2

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (,000)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Penanggulangan Bencana	1,503,428	1,161,029,9	77.23	81.57%	342,398,1	22.77%
Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda	233,140	199,095,2	85,40	100%	34,044,8	14.60%
Pengembangan pusdalops Jateng	636,860	623,504,7	97,90	100%	13,355,3	2.10%
Evaluasi, pemantauan, dan penanganan darurat bencana	493,850	202,418,5	40,99	43,89%	291,431,5	59.01%

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (,000)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Bintek sar, latihan gabungan dan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (trc) bencana jateng	139,578	136,011,5	97,44	100%	3,566,5	2.56%

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda.
 - a) Simulasi Penanganan Darurat Bencana bagi Pelajar;
 - b) Rapat Persiapan Pembinaan dan Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah;
 - c) Pembinaan Penanganan Darurat Bencana Covid-19 di Jawa Tengah Tahun 2020;
- 2) Kegiatan Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana.
 - a) Rapat evaluasi penanganan bencana tahun 2019 dan pemutakhiran data relawan penanggulangan bencana provinsi jawa tengah tahun 2020;
 - b) Droping Air Bersih;
 - c) Rapat Pembahasan Forum TJSLP pada Pokja Bidang Kedaruratan;
 - d) Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kekeringan dan Antisipasi Ancaman Bencana Banjir dan Longsor di Jawa Tengah Tahun 2020;
 - e) Rapat Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Penanganan Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan/atau Limbah B3 Prov Jateng;
 - f) Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran Pasar Wage Purwokerto Kab. Banyumas;
 - g) Penyusunan Konsep Penanganan Terpadu Antisipasi dan Kesiapsiagaan Bencana Banjir Longsor;

- h) Penyusunan Konsep Penanganan Terpadu Antisipasi dan Kesiapsiagaan Bencana Banjir Longsor Masing-masing Wilayah;
 - i) Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Aktivitas Gunung Merapi;
 - j) Rapat Koordinasi Forum dan Pokja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) Provinsi Jawa Tengah;
 - k) Rakor Kecepatan Sistem Informasi Dalam Penanganan Bencana melalui Pusdalops dan Peran Serta BPBD dalam menyongsong Libur Natal dan Tahun baru;
 - l) Rapat Koordinasi Permohonan Bantuan Perbaikan Rumah Rusak Akibat Bencana;
- 3) Kegiatan Pengembangan Pusdalops Jateng.
- a) Posko Bencana Radio;
 - b) Posko Bencana Banjir Longsor, Covid-19, dan Gunung Merapi.
- 4) Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng, berupa Latihan Gabungan Relawan Penanggulangan Bencana.

3. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	: Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
Indikator	: Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi
Jenis	: Progres positif
Satuan	: %
Target	: 100

Sasaran strategis 3, yaitu Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana, dengan indikator persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi yang merupakan jumlah daerah yang terdampak bencana yang terfasilitasi dalam pemulihan pasca bencana dibagi jumlah daerah terdampak bencana yang membutuhkan

pemulihan pasca bencana dikali 100%. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 11.

Tabel 11
Perhitungan Kinerja Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Th 2020	% Capaian Th 2019	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100	100	100	100	100

Pemulihan pasca bencana yang terealisasi tahun 2020 tercapai sebesar 100% dari target semula adalah 100%. Hal ini berarti bahwa meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana di Jawa Tengah termasuk kategori baik yaitu tercapai 100%.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi inventarisasi dan verifikasi data kerusakan infrastruktur terdampak bencana di kabupaten/kota dengan melibatkan OPD terkait dalam penanggulangan bencana baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi rapat persiapan dan observasi dilapangan sebagai upaya verifikasi data yang telah diajukan/dilaporkan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah dan dikoordinasikan bagaimana cara penanganannya sesuai dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui system manajemen pascabencana sebagai upaya pemulihan pascabencana dengan melakukan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didahului dengan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana (*Damage and Losses Assesment/DaLA*) untuk memperoleh kajian kebutuhan pasca bencana atau JITU PB.

Pada kegiatan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan PB dalam kajian kebutuhan pasca bencana Jateng dengan target 25 Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana terealisasi 0% dalam jumlah tenaga ahli yang terlatih karena kegiatan pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) tidak terlaksana terkendala refokusing anggaran pasca covid-19 dan rapat koordinasi pasca bencana tidak terlaksana terkendala pertemuan tatap muka. Upaya pemecahannya adalah merencanakan pelatihan melalui daring (dalam jaringan) namun tetap mengoptimalkan capaian yang diinginkan apabila situasi pandemi belum kembali normal.

Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (Damage and Losses Assessment/DaLA) dan JITU PB melibatkan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Palang Merah Indonesia. Metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (*Damage and Losses Assesment/DaLA*) menggunakan metode dari ECLAC (Economic Commission For Latin America And Caribbean) yang dikembangkan oleh Bank Dunia sebagai salah satu instrumen analisis untuk mengukur besarnya dampak bencana di dunia, termasuk di Indonesia dan untuk mengkaji kebutuhan pasca bencana (JITU PB) berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana.

Untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan rekonstruksi pasca bencana dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, guna penanganan rekonstruksi pasca bencana di wilayah terdampak bencana. Adapun pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi

ataupun forum diskusi terfokus (FGD) sebagai kegiatan koordinasi dan fasilitasi serta konsultasi semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, kegiatan sinergitas multi sektor pasca bencana di Jawa Tengah, juga merupakan *sharing* pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pendampingan pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah. Pada tahun 2019 bantuan hibah dari BNPB ke BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sejumlah Rp 200.000.000,- untuk bantuan hibah dimaksud dipergunakan untuk Rekonstruksi Jalan Panimbang-Babakan Desa Mandala dengan dana Rp 970.903.927,14,-, Relokasi Korban Tanah Longsor Desa Padangjaya dengan dana Rp 1.873.765.663,35,- dan Relokasi Korban Tanah Longsor Desa Cibeunying dengan nilai kontrak Rp 253.000.000,-.

Dengan demikian terbentuklah suatu pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan penanggulangan bencana bahwa pada tahapan pasca bencana diperlukan usaha bersama untuk pemulihan dan rekonstruksi kembali sarana dan prasarana umum terdampak bencana.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp 953,619,000,- dengan realisasi keuangan pada akhir tahun adalah Rp 811,187,435,- dan realisasi fisik sebanyak Rp 925,559,000,- dengan rincian pada tabel 12.

Tabel 12
Efisiensi Anggaran Sasaran 3

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (,000)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Penanggulangan Bencana	953,619	811,187,4	85.06%	97.06%	142,431,5	14.94%
Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng	496,840	477,923,3	96,19%	100%	18,916,6	3.81%
Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	109,759	70,673,4	64,39%	74,43%	39,085,6	35.61%
Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng	347,020	262,590,7	75,67%	100%	84,429,3	24.33%

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Penanganan rehabilitasi pasca bencana di jateng
Sosialisasi dan Pelatihan Alat Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana;
- 2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pb dalam kajian kebutuhan pasca bencana jateng;
 - a) Kegiatan FGD Inventarisasi/Verifikasi data Kerusakan Infastruktur;
 - b) Pelatihan Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA).
- 3) Sinergitas multisektor penanganan pascabencana jateng.
 - a) Pertemuan Rapat Koordinasi Teknis ke-1 (satu) di Kab. Boyolali;
 - b) Pertemuan Rapat Koordinasi Teknis ke-2 (dua) di Kab. Blora;
 - c) Pertemuan Rapat Koordinasi Teknis ke-3 (tiga) di Kab. Surakarta;
 - d) Pertemuan Rakor Teknis ke-4 (empat) di Kab. Sukoharjo.

4. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana

Indikator : Persentase kecukupan kebutuhan dasar

dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi

Jenis : Progres positif

Satuan : %

Target : 100

Sasaran strategis 4, yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana yang diukur berdasarkan persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi. Dimana jumlah wilayah terdampak bencana yang dipenuhi kebutuhan dasar serta peralatan dibagi jumlah wilayah terdampak bencana yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan peralatan dikali 100%. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 13.

Tabel 13
Perhitungan Kinerja Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Th 2020	% Capaian Th 2019	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100	100	100	100	100

Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi tahun 2020 tercapai sebesar 100% dari target semula adalah 100%. Hal ini berarti bahwa meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana di Jawa Tengah tercapai sebesar 100% atau termasuk kategori baik dan sesuai target pencapaian yaitu 100%.

Sistem informasi pergudangan dalam pengelolaan logistik dan peralatan merupakan rangkaian kegiatan penatalaksanaan pergerakan

logistik dan peralatan secara tertib tentang penerimaan, pendistribusian, ketersediaan, pengendalian, penggunaan, penghapusan dan pelaporan logistik dan peralatan yang dikelola di gudang yang akan menjadi informasi bagi pejabat pembuat keputusan/kebijaksanaan (Ka. BNPB, Ka. BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keluaran dari sistem informasi ini berupa:

- a. Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan tentang:
 - 1) Kegiatan Penerimaan;
 - 2) Kegiatan Penyimpanan;
 - 3) Kegiatan Distribusi.
- b. Laporan mutasi logistik dan peralatan di gudang;
- c. Laporan pemeliharaan berkala (bila diperlukan);
- d. Dalam keadaan tanggap darurat Laporan dilakukan dalam waktu yang lebih pendek sesuai dengan kebutuhan;
- e. Stok opname dilakukan secara berkala.

Dalam mekanisme pergudangan ada beberapa proses yang harus runtut dan sesuai dengan pedoman Perka BNPB NOMOR 06 TAHUN 2009 tentang Pedoman Pergudangan antara lain penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian serta penghapusan.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp 2,893,668,000,- atau 0.95% dari dana belanja langsung BPBD Prov. Jateng. Realisasi keuangan pada akhir tahun adalah Rp 2,740,836,465,- (94.72%) dan realisasi fisik sebanyak Rp 2,893,668,000,- (100%) dengan rincian efisiensi penggunaan anggaran pada tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Efisiensi Anggaran Sasaran 4

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (,000)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Penanggulangan Bencana	2,893,668	2,740,836,4	94.72%	100%	152,831,5	5.28%
Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	1,869,232	1,730,098	92,56%	100%	139,134	7.44%

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (,000)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng	1,024,436	1,010,738,4	98,66%	100%	13,697,5	1.34%

Keberhasilan pencapaian sasaran ini, tidak terlepas dari dilaksanakan program penyelenggaraan penanggulangan bencana, dengan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, meliputi:

Rapat Koordinasi Inventarisasi Dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah.

- 2) Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana jateng, meliputi:

Rapat Koordinasi Inventarisasi Dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah.

5. Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai kepuasan masyarakat

Jenis : Progres positif

Satuan : Angka

Target : 75

Sasaran Strategis 5.2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator : Nilai SAKIP BPBD Prov Jateng

Jenis : Progres positif

Satuan : Angka

Target : 66

Sasaran Strategis 5.3 : Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana

Indikator : Indeks Ketahanan Daerah

Jenis : Progres positif

Satuan : Angka

Target : 3.54

Sasaran strategis 5, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta meningkatnya ketangguhan masyarakat Jateng dalam PB. Hasil pengukuran/perhitungan kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel 15.

Tabel 15
Perhitungan Kinerja Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Th 2020	% Capaian Thn 2019	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	75	82.34	109.79	109.40	91.49
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	66	72.26	109.48	110.20	103.23
Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	3.54	3.54	100	100	98.33

Nilai kepuasan masyarakat tahun 2020 tercapai sebesar 82,34% dari target semula adalah 75%. Hal ini berarti bahwa meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Jawa Tengah (BPBD Provinsi Jawa Tengah) sangat baik yaitu tercapai sebesar 109,79% dari target 100%. Masyarakat Jawa Tengah mendapat pelayanan yang baik dalam bidang penanggulangan bencana.

Untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 72,26 dari target 66. Hal ini berarti akuntabilitas kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori sangat baik, yaitu tercapai sebesar 109,48% dari target 100%. Sedangkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2020 tercapai sebesar 3,54 sesuai target. Hal ini berarti bahwa dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana termasuk dalam kategori baik.

Penggunaan sumber daya keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp 7,180,261,249,- (91.48%) dari pagu anggaran sebesar Rp 7,848,599,000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya keuangan sebesar Rp 668,337,751.00,- (Tabel 16).

Tabel 16
Efisiensi Anggaran Sasaran 5

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (,000)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
NON URUSAN	7,848,599	7,180,261,2	91.48%	100%	668,337,7	8.52%
Manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	7,479,919	6,863,034,4	91.75%	100%	616,884,5	8.25%
Kegiatan administrasi pelayanan keuangan perangkat daerah	1,764,660	1,722,824,6	97,63%	100%	41,835,400	2.37%
Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	145,404	140,523,2	96,64%	100%	4,880,745	3.36%
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	631,000	613,682,8	97,26%	100%	17,317,168	2.74%
Kegiatan penyediaan jaminan barang milik daerah	250,000	246,165	98,47%	100%	3,834,950	1.53%
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	488,165	488,154	100%	100%	11,000	0.00%
Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah	1,675,544	1,160,303,8	69,25%	100%	515,240,1	30.75%
Kegiatan pelayanan penyediaan makan minum rapat perangkat daerah	162,155	161,893,2	99,84%	100%	261,716	0.16%
Kegiatan penyediaan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	12,626	12,626	100%	100%	0	0%
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/ kendaraan dinas/operasional perangkat daerah	216,000	215,917,6	99,96%	100%	82,3	0.04%
Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	283,910	283,592,2	99,89%	100%	317,8	0.11%
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	1,204,000	1,204,000	100%	100%	0	0%
Kegiatan pengadaan pakaian dinas	30,904	30,380	98,30%	100%	524	1.70%
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	48,600	43,188,8	88,87%	100%	5,411,1	11.13%
Kegiatan pelayanan informasi perangkat daerah	113,855	89,027,8	78,19%	100%	24,827,1	21.81%
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	61,818	59,481,1	96,22%	100%	2,336,8	3.78%

Nama Program/ Kegiatan	Jmlh Anggaran (,000)	Realisasi Keu (,000)		Realisasi Fisik (,000)	Efisiensi/ Sisa Anggaran (,000)	
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	391,278	391,273,8	100%	100%	4,1	0%
Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	368,680	317,226,8	86.04%	100%	51,453,1	13.96%
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	321,510	283,208,5	88,09%	100%	38,301,4	11.91%
Kegiatan penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	47,170	34,018,2	72,12%	100%	13,151,7	27.88%

Mendasarkan tabel masing-masing Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), resumenya adalah sebagai berikut pada tabel 17.

Tabel 17
Pengukuran Pencapaian Sasaran

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Tahun 2019	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	2 Desa	3	150	112.50	100
Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	Persentase upaya PRB Jateng	5%	5.10	102	100	17
Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	1 Unit	1	100	105.60	25.63
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana	Jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	150 Orang	150	100	100	17.69
Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda	Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih	2 Angkatan	2	100	100	24.32
Pengembangan Pusdalops Jateng	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	100%	100	100	100	100
Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	Jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	3 Kegiatan	3	100	100	20.83
Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	Jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	2 Kelompok	2	100	100	20
Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng	Persentase masyarakat terdampak yang	100%	100	100	100	111.11

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2020	% Capaian Tahun 2019	% Capaian thd Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
	direhab					
Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	25 Orang	0	0	100	20
Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana Jateng	Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	100%	100	100	100	111.11
Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	10 Jenis	10	100	100	20
	Persentase dapur umum yang dilaksanakan	100%	100	100	100	100
Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng	Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	8 Unit	12	150	90	42
	Persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	100%	100	100	100	100

B. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi keuangan atas pengelolaan APBD TA 2020 pada BPBD Prov Jawa Tengah secara keseluruhan tercapai sebesar 90,72%, terdiri dari:

Tabel 18
Realisasi Keuangan APBD TA 2020

No	Belanja	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1.	Belanja Tidak Langsung	6.291.267.000	5.729.591.000	91,07	561,676,000
2.	Belanja Langsung	16.117.051.000	14.621.847.321	90,72	1,495,203,679
Jumlah		22,408,318,000	20,351,438,321	90.82	2,056,879,679

Belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sejumlah 36 orang pegawai. Realisasi keuangan terserap sebesar Rp 5.729.591.000,- (90,07%). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 561,676,000,- (9.93%). Efisiensi belanja dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan belanja sesuai dengan pegawai di BPBD Prov Jateng.

Alokasi anggaran belanja langsung untuk 3 (tiga) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan Rp 16.117.051.000,- secara fisik tercapai 98,11%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 14.621.847.321,- (90,72%). Capaian realisasi fisik tidak mencapai 100% disebabkan terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana dan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng disebabkan hal sebagai berikut:

1. Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana

a. Permasalahan

Droping air bersih hanya terlaksana sebagian, dikarenakan musim kemarau basah, dan pemerintah kabupaten/kota sudah lebih siap.

b. Upaya

Merencanakan kegiatan droping air bersih berdasarkan kebutuhan daerah dari kajian daerah rawan kekeringan (sudah dilakukan) dan kecenderungan musim melalui data time series serta mengoptimalkan kemampuan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dalam penyediaan air bersih.

2. Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng

a. Permasalahan

1) Kegiatan pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna) tidak terlaksana terkendala refokusing anggaran pasca covid-19; dan rapat koordinasi pasca bencana tidak terlaksana terkendala pertemuan tatap muka.

2) Kegiatan Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Tidak Terlaksana Terkendala Refokusing Anggaran Pasca Covid-19 dan Rakor Pasca Bencana Tidak Terlaksana Terkendala Pertemuan Tatap Muka.

b. Upaya Pemecahan

Merencanakan pelatihan melalui dalam jaringan (daring) namun tetap mengoptimalkan capaian yang diinginkan apabila situasi pandemi belum kembali normal.

Realisasi keuangan pada belanja program/kegiatan dapat dikelompokkan pada tabel 19.

Tabel 19
Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 2020

No	Realisasi Capaian (%)	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1.	95.01 – 100	21 Kegiatan	67.74
2.	90.01 – 95	0 Kegiatan	0
3.	00.00 < 90	10 Kegiatan	32.25
Total		31 Kegiatan	100

Mendasarkan capaian/realisasi keuangan kegiatan pada tabel tersebut, terdapat 10 (sepuluh) kegiatan dengan serapan kurang dari 90%, yaitu Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah, Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana, Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda, Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana, Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng dan Sinergitas multisektor Penanganan pasca bencana Jateng.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, telah berupaya mengelola sumber daya manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Dengan memperhatikan uraian data capaian kinerja sasaran pada Bab sebelumnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah disimpulkan berhasil, mengingat telah tercapainya seluruh target/sasaran yang ditetapkan dengan kategori Amat Baik.

Perhitungan atas Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan jumlah Indikator Kinerja Program adalah 4 dan Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (100%) sedangkan Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan adalah 15 sedangkan Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (93.48%). Sehingga Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (106.96%) maka Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Jawa Tengah **Sangat Tinggi**.

B. Saran

Mensikapi tantangan yang dihadapi selama ini, maka beberapa strategi perlu dirumuskan kembali untuk pencapaian dan peningkatan kualitas manfaat kegiatan PB, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada masyarakat yang menempati daerah rawan bencana tinggi;

2. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan bidang kebencanaan, baik yang bersifat operasional dilapangan maupun teknis administratif kepada aparatur pemerintah;
3. Memberikan pelatihan secara tepat kepada aparatur, masyarakat dan dunia usaha terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, pada tahap sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana;
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD untuk segera membentuk BPBD dengan peraturan daerah serta mengisi struktur dan lembaganya dengan personil yang berkompeten;
5. Mendorong BPBD Kabupaten/Kota untuk penyusunan dokumen perencanaan PB, seperti dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), rencana kontijensi dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Pendokumentasian kegiatan PB sejak dini, dalam rangka upaya antisipasi sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bersama ataupun sebagai “role model” dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan kerjasama antara pemangku kepentingan PB terutama pada peran masyarakat dan dunia usaha serta mendorong terbentuknya kerjasama dengan lembaga donor nasional maupun internasional untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
8. Peningkatan kapasitas aparatur PB di seluruh tingkatan melalui diklat teknis dan formal, sebagai upaya menyikapi terjadinya rotasi/mutasi aparatur sumberdaya PB yang telah terlatih;
9. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti sertifikasi bagi aparatur PB di daerah sehingga dapat dimonitoring potensi kapasitas aparatur PB sesuai kompetensi dan keahliannya;
10. Pemutakhiran data sumberdaya sarana dan prasarana yang ada dilingkungan pemerintah daerah dan pendataan secara masif dari

berbagai lembaga, sehingga dapat dimobilisasi secara optimal saat terjadi bencana;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Semarang,
Plt. KALAKHAR
BPBD PROV JAWA TENGAH

Ir. SAFRUDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690603 199403 1 007